



Analisis Isi Berita Difabel di *Kompas.com* pada Pemilihan Presiden 2019 untuk Mendukung Media Ramah Penyandang Disabilitas pada Pilpres 2024

Nadhiroh, Atik Nurfatmawati^{(a)(*)}

^(a) Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

*Korespondensi Penulis, Email: nadhiroh@staimaswonogiri.ac.id

A B S T R A C T

Keywords:
news, difabel,
presidential
election, inclusive
election,
disability.

People with disabilities need special attention, not compassion. They have their own abilities if their assistance is really maximized. Since 1992, the United Nations (UN) has designated December 3 as International Day of Persons with Disabilities. Little by little the concern and attention to the problems faced by people with disabilities is increasing. Various access more powder. One form of attention is through the news. The mass media are increasingly providing space for news reports on diffable issues. Including in the implementation of the 2019 presidential election. Efforts to support the implementation of inclusive elections continue to be increased. The mass media have a big contribution to guard support for people with disabilities. This research focuses on analyzing the news of people with disabilities in the 2019 Presidential Election at *kompas.com*. This research aims to examine what is the content of news about people with disabilities from the campaign period until the 2019 Presidential Election. In addition, this article is expected to be able to support disability-friendly media in the 2024 General Election The method used is to collect news about people with disabilities related to the 2019 Presidential Election which is published on *kompas.com*. Researchers hope that efforts to realize inclusive elections will continue to be improved as a step to fulfill the rights of people with disabilities.

A B S T R A K

Kata Kunci:

berita, difabel, pilpres, pemilu inklusif

Orang difabel perlu mendapatkan perhatian khusus bukan belas kasihan. Mereka memiliki kemampuan sendiri jika benar-benar dimaksimalkan pendampingannya. Sejak tahun 1992, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan setiap 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Sedikit demi sedikit kepedulian dan perhatian kepada permasalahan yang dihadapi difabel semakin meningkat. Berbagai akses makin serbuka. Salah satu bentuk perhatian yaitu melalui pemberitaan. Media massa semakin memberikan ruang untuk pemberitaan-pemberitaan isu difabel. Termasuk di dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2019 lalu. Upaya-upaya mendukung pelaksanaan pemilu inklusif terus ditingkatkan. Media massa punya kontribusi besar untuk mengawal dukungan kepada para difabel. Penelitian ini fokus analisis pemberitaan difabel dalam Pilpres 2019 di *kompas.com*. Riset ini bertujuan mengkaji apa saja isi berita tentang difabel sejak masa kampanye sampai menjelang Pilpres 2019. Selain itu, artikel ini diharapkan bisa ikut mendukung media ramah penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2024. Metode yang digunakan yaitu mengumpulkan berita-berita tentang difabel terkait Pilpres 2019 yang dimuat di *kompas.com* secara acak kemudian menganalisis isinya. Peneliti berharap, upaya untuk mewujudkan pemilu inklusif terus ditingkatkan sebagai langkah memenuhi hak penyandang difabel.

Pendahuluan

Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) pada Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPDI), hingga 13 Januari 2021, jumlah penyandang disabilitas yang tercatat sebanyak 209.604 individu. Mengacu data *simpdi.kemensos.go.id*, terdapat 12 kategori penyandang disabilitas yaitu daksa (65.449 orang), eks kusta/penyakit kronis (2.487 orang), ganda/multi

(65.065 orang), mental/gangguan jiwa (26.561 orang), autisme (3.820 orang), tunarungu (13.800 orang), tunawicara (5.580 orang), *low vision* (6.806 orang), *total blind* (11.352 orang), lambat belajar (3.658 orang), grahita (13.140 orang) dan *down syndrome* (4.187 orang). Berdasarkan data di atas, potensi difabel untuk menjadi pemilih termasuk besar. Namun, praktik di lapangan belum sepenuhnya penyandang difabel atau disabilitas bisa menyampaikan aspirasinya.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu secara eksplisit menyebutkan soal difabel pada pasal 5 tentang pemilihan umum. Difabel yang memenuhi syarat bisa menjadi pemilih, peserta pemilu baik caleg DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, Kabupaten atau Kota, bahkan bisa menjadi calon presiden dan wakil, serta menjadi penyelenggara pemilu. Kajian-kajian mengenai difabel semakin berkembang dengan kian banyaknya perhatian dan kepedulian sebagian masyarakat untuk memenuhi hak-hak difabel. Di berbagai wilayah pelayanan inklusif semakin digalakkan. Sekolah inklusif, kampus inklusif dan lain sebagainya. Begitu pula dengan upaya para wartawan untuk mendukung terwujudnya pemenuhan hak-hak difabel. Jurnalis menyuarakan aspirasi mereka melalui pemberitaan.

Beberapa riset terkait di antaranya yaitu pertama penelitian Julita Widya Dwintari, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia* (2018, h.53). Julita menyimpulkan pada kenyatannya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih belum sepenuhnya terakses oleh penyandang disabilitas. Permasalahan yang terjadi antara lain TPS yang sempit dan sulit dijangkau karena terletak di taman berumput tebal, bahkan masih tidak ditemukannya alat bantu seperti *braille template* bagi yang tuna netra di beberapa TPS di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 1) Peran keluarga yang belum maksimal; 2) sikap apatis dari penyandang disabilitas; 3) Ketidaktanggapan petugas penyelenggara Pemilu.; 4) wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga sulit terakomodir dengan baik terutama daerah terpencil; 5) Regulasi yang sering berubah yang sering membingungkan rakyat; 6) Penduduk Indonesia yang terlalu banyak menjadikan proses sosialisasi tidak optimal; 7) Media yang tidak terakses penyandang disabilitas. Melihat belum sinergi antara harapan, aturan dan kenyataan menjadikan pemerintah Indonesia perlu segera memperbaiki sistem pelaksanaan pemilu yang lebih mudah, murah, terjangkau dan tentu saja aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian diharapkan ke depannya

akan tercipta suatu demokrasi dalam negara Indonesia yang penuh dengan persamaan dan keadilan, baik bagi mereka yang normal maupun bagi mereka yang disabilitas. Pemerintah sebaiknya menerapkan fasilitas teknologi dalam Pemilu atau Pemilukada menjadi salah satu pilihan untuk terwujudnya Pemilu yang bisa diakses bagi setiap pemilihnya. Penyampaian Informasi atau sosialisasi Pemilu melalui media elektronik televisi, radio dan media cetak akan sangat membantu pemilih terutama yang tinggal di daerah dan di tempat terpencil.

Informasi pemungutan suara melalui media elektronik sangat dibutuhkan pemilih penyandang disabilitas. Pemerintah harus mengoptimalkan alokasi anggaran pemilu untuk penyandang disabilitas dan memberikan pelatihan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Peraturan di KPU saat ini sebenarnya sudah mengakomodasi hak politik penyandang disabilitas tapi pelaksanaannya masih lemah dan ada diskriminasi. Petugas DPT perlu lebih berhati-hati untuk menghitung penduduk yang memiliki hak pilih. Apalagi, jika di dalam pemilih tetap itu ada penyandang disabilitas. Untuk KPPS perlu memahami tentang perlunya aksesibilitas ke seluruh penduduk yang merupakan pemilih. Harus dipertimbangkan ketika memutuskan fasilitas tempat pemungutan suara (TPS) termasuk di dalamnya meliputi formulir, bangunan TPS, tinggi, meja pemungutan suara, dan ukuran bilik suara. Untuk KPPS perlu memberikan pelayanan khusus pemilih penyandang disabilitas. Saat merawat penyandang disabilitas, derajat disabilitas perlu disesuaikan. Pastikan dari mereka mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Peneliti melihat upaya untuk mengkaji isi berita tentang difabel dalam riset ini penting mengingat adanya harapan agar pemilu inklusif di Indonesia benar-benar bisa terwujud. *Kedua*, riset Hendro (2018, h.291-292) yang menyimpulkan hak-hak penyandang tunarungu atas aksesibilitas dan komunikasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun demikian, bukan berarti hak-hak penyandang tunarungu sama sekali tidak terlindungi, melainkan masih dalam tahap perkembangan. Peneliti riset ini menemukan bahwa orang tuli memiliki dua keadaan yaitu orang tuli dengan hak terpenuhi dan orang tuli dengan hak tidak terpenuhi. Hal ini terlihat jelas dalam hak berkomunikasi dalam bentuk bahasa isyarat, dimana penyandang tunarungu terpaksa menggunakan bahasa lisan dan gerak bibir, padahal

penyandang tunarungu memiliki bahasa isyarat sebagai bahasa komunikasinya. Terutama bagi mereka yang terlibat dalam komunitas tunarungu sehari-hari.

Kondisi ini berbeda dengan penyandang tunarungu yang ditempatkan di lingkungan dan budaya pendengaran. Sejak kecil, orang tuli dibesarkan dalam budaya mendengar daripada budaya tuli, sehingga mereka memiliki pemahaman yang buruk tentang pesan orang-orang yang mendengar ketika berkomunikasi melalui bahasa lisan dan membaca bibir. Selanjutnya, mengenai hak aksesibilitas, kami menemukan kondisi yang hampir sama dengan pelaksanaan hak komunikasi. Salah satu contohnya adalah akses tidak terbatas bagi penyandang tunarungu untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi. Orang dengan gangguan pendengaran masih merasa sulit dan cacat untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan rekreasi seperti mengakses program televisi dan film. Hal ini karena informasi yang akan disampaikan lebih mengandalkan bahasa lisan dan ucapan daripada transliterasi informasi lisan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana berita tentang difabel pada pemilihan presiden 2019 di kompas.com?. Berdasarkan pengamatan peneliti, belum ada riset yang secara spesifik mengkaji tentang pemberitaan difabel pada pemilihan presiden di kompas.com. Melalui penelitian ini, harapan penyusun yaitu terwujudnya pemilu inklusif bisa terus diupayakan dan didorong melalui pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak, penyiaran, maupun online.

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini cocok untuk menjelaskan tentang framing yang dilakukan surat kabar online Kompas.com terhadap pemberitaan isu disabilitas. Penelitian kualitatif berusaha masuk lebih dalam dan memahami pemaknaan akan kebenaran yang berbeda-beda oleh orang yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti memilih metode penelitian kualitatif dikarenakan kebenaran dari pembingkai yang dibentuk oleh Kompas.com.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Konstruksionisme. Dimana realitas dalam aliran Konstruksionisme itu ada dalam beragam bentuk

konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik (Agus Salim, 2006:71) Dalam buku yang berjudul “Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Media”. Peter L. Berger (Eriyanto,2002:18) mengatakan “Realitas itu dibentuk dan dikonstruksi. Realitas tidak lahir secara ilmiah. Setiap orang dapat memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas realitas yang diterimanya”. Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kebenarannya tidak pasti (positivism) akan tetapi kebenaran terdapat di lapangan saat penelitian dilakukan (konstruksionisme). Setiap wartawan yang mengisahkan suatu realitas memiliki pengalaman, tingkat pendidikan, lingkungan sosial dan bahkan ideologi yang berbeda. Oleh karena itu, kebenaran tidak dapat dijawab secara pasti.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif menurut Soegiyono adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisa data dengan cara penggambaran hasil penelitian tetapi tidak untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Soegiyono, 2009:21). Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif dikarenakan dalam proses penelitian, peneliti ingin deskripsikan suatu fenomena yang terjadi dalam hal ini adalah menjelaskan framing yang dilakukan Kompas.com terhadap pemberitaan isu disabilitas dalam pemilihan presiden 2019.

Unit analisis merupakan suatu unit dimana data yang berhubungan dengan bahan penelitian dikumpulkan. Selain itu, unit Amatan dapat berarti segala sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan satuan analisis (Ihalauw,2004:178). Oleh karena itu, dalam penelitian ini unit amatannya adalah pemberitaan isu disabilitas dalam pemilihan umum yang dimuat dalam surat kabar online Kompas.com tanggal 28 Agustus 2018 hingga 16 April 2019. Berkaitan dengan pokok-pokok utama atau subjek utama dari penelitian yang akan diteliti. Selain itu, Unit Analisa memiliki pengertian agrerasi data yang dikumpulkan untuk dianalisa dalam rangka menjawab persoalan-persoalan penelitian (Ihalauw,2004:174). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisa adalah isi berita dalam surat kabar online Kompas.com tentang pemberitaan isu disabilitas dalam pemilihan umum 2019.

Jenis dan metode pengumpulan data terdapat dua macam jenis data dalam penelitian. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari sumber pertama. dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan peneliti adalah pemberitaan-pemberitaan atau artikel-artikel yang berkaitan tentang isu disabilitas dalam pemilihan presiden 2019 yang dimuat di surat kabar online Kompas.com. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung dari data primer untuk membantu proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku dan literatur ilmiah untuk mendukung analisa dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan dokumentasi dengan mengkliping berita yang berkaitan dengan isu disabilitas dalam pemilihan presiden 2019 yang telah dimuat di surat Kompas.com. kliping tersebut kemudian akan dianalisis oleh penulis berdasarkan analisis framing dengan model Pan dan Kosicki.

Pembahasan

Berita, Difabel dan Pemilihan Umum

Kata difabel kependekan dari *different abilities people* atau orang yang mempunyai kemampuan berbeda. Masyarakat didorong agar lebih luas dalam memaknai kehadiran difabel. Yaitu, bagi mereka yang semula melihat dan menganggap keadaan tidak normal atau cacat sebagai ketidakmampuan atau kekurangan. Namun, saat ini perlu digarisbawahi agar memandang difabel sebagai sosok yang bisa menjalankan kegiatan dengan jalan dan hasil yang berbeda.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mendorong ratifikasi UU Penyandang Cacat menjadi UU Konvensi Penyandang Disabilitas (*The Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada 18 Oktober 2011. Istilah difabel berasal dan digunakan di Indonesia sekitar tahun 1998 sebagai istilah untuk penyandang disabilitas, atau sebagai eufemisme untuk istilah “cacat”. Kami menyerukan ratifikasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas terhadap Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Istilah difabel sebagai alternatif baru pertama kali diperkenalkan di Yogyakarta. Istilah tersebut digagas oleh beberapa LSM di Yogyakarta yaitu Setyo Adi Purwanta, Mansur Fakhri dan Lily Purba. Mereka menciptakan istilah difabel sebagai akronim dari bahasa Inggris “*differently able*” atau “*different ability*” dengan maksud bahwa perbedaan fisik dan mental hanyalah transformasi dan perbedaan. (Rof’ah, Lomba Wacana, 2,3,4) Menurut Rof’ah,

definisi dan makna disabilitas (penyandang disabilitas/cacat) telah menjadi bahan perdebatan panjang. Definisi 'disabilitas' dalam komunitas medis dipertanyakan karena dipandang sebagai sumber diskriminasi dan marginalisasi penyandang disabilitas dalam struktur sosial. Rof'ah, *lomba wacana wacana. (Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks, hal. 49)*

Difabilitas, berdasarkan penelusuran Arif dari berbagai sumber, terutama Oxford Dictionary ('differentlyable', n.d.) dan The Phrase Finder ('differentlyable', n.d.), menghasilkan sebuah artikel yang diterbitkan pada 9 April. Sebuah artikel 1985 yang diterbitkan di LA berjudul "Apakah bahasa itu sendiri dinonaktifkan karena gagal mendefinisikan orang cacat secara adil?" adalah nyanyian Penulis sendiri memilih kata *handicap*. Ia kini menanggapi kritikan dari berbagai pihak terkait pilihan kata-katanya. (2016, hal.150). Menurut penelitian Arif, dalam konteks Indonesia, istilah 'penyandang disabilitas' adalah istilah yang sangat umum bersama dengan 'disabilitas' dan digunakan pada tingkatan yang berbeda. Istilah *difabel* masih umum digunakan di dunia akademis, tetapi *difabel* memiliki arti yang sama di masyarakat dan akademisi. Disabilitas kini menjadi istilah yang digunakan di dunia online. (2020, 50 halaman)

Terlepas dari berbagai definisi disabilitas dan penyandang disabilitas yang berkembang di masyarakat, penulis memahami bahwa memang ada upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pada umumnya, dan para aktivis pada khususnya. Selain itu, ada regulasi yang secara khusus mempertimbangkan kepentingan penyandang disabilitas. Di Indonesia, Pasal 28H(2) dan 28I(2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki sejumlah undang-undang yang berlaku bagi penyandang disabilitas. penyandang disabilitas Payung. Pemilu Aksesibilitas Indonesia Disabilitas UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Penyandang Disabilitas, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Presiden No. 42 Wakil Gubernur, 2008 Peraturan No. 35 Tahun 2008 Peraturan Prefektur No. 3, 2009 Peraturan Prefektur No. 29, 2008 Peraturan Prefektur No. 23. Pada aturan-aturan itu sudah dijelaskan secara detil mengenal hak-hak *difabel* dalam pelaksanaan pemilu termasuk di dalamnya pemilihan presiden, pemilihan legislatif (DPR/DPRD) dan pemilihan

kepala daerah (pemilihan gubernur dan walikota atau bupati).

Kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas perlu terus diperjuangkan demi menegakkan persamaan hak. Kesetaraan tersebut dengan memberikan fasilitas pendukung bagi disabilitas untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Pemberian fasilitas tersebut memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan bersosial, berbangsa, bernegara. Pencapaian hak dan kewajiban penyandang disabilitas selain membutuhkan peranan besar dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang ramah difabel. Hal tersebut juga memerlukan partisipasi dan peranan aktif dari seluruh masyarakat untuk menciptakan situasi sosial yang ramah untuk difabel.

Berita Difabel di *Kompas.com*

Riset ini mengambil sampel berita secara acak yang terkait difabel pada pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di *kompas.com*, khususnya saat sebelum kampanye, memasuki masa kampanye dan menjelang Pilpres. Di dalam mengambil sampel ini, saya langsung mencari dengan kata-kata kunci difabel, disabilitas, pilpres, dan *kompas.com*. Penulis mengamati *kompas.com* sudah berupaya menyajikan berita-berita tentang difabel yang beragam, mulai dari sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, dan menjelang Pilpres 2019. Tidak hanya straight news yang disuguhkan. Beberapa berita feature yang juga dikemas menjadi berita-berita yang menghadirkan narasumber difabel.

Berikut ini sampel judul-judul berita dan URL yang telah penulis rangkum dalam sebuah table/

Tabel 1

Data Pemberitaan Difabel di *kompas.com*

No	Hari/tanggal	Judul
1.	Jumat, 28 Agustus 2018	KPU Diminta Lebih Perhatikan Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu 2019
2.	Kamis, 17 Januari 2019	Adu Pernyataan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga soal Disabilitas
3.	Jumat, 18 Januari 2019	Jokowi Klaim Bangun Fasilitas untuk Difabel, Cek Faktanya...

4.	Jumat, 18 Januari 2019	Nelayan dan Difabel Ini Disebut Sandiaga dalam Debat Pilpres 2019
5.	Kamis, 14 Februari 2019	KPU Sediakan Alat Bantu Huruf Braille untuk Pemilih Tunanetra
6.	Kamis, 28 Februari 2019	Timses Sebut Visi Jokowi-Ma'ruf Perhatikan Penyandang Disabilitas
7.	Kamis, 1 Maret 2019	KPU Jombang Ajak Penyandang Disabilitas Simulasi Cara Mencoblos
8.	Selasa, 19 Maret 2019	INFOGRAFIK: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019
9.	Rabu, 27 Maret 2019	Cerita Suka Duka Penyandang Disabilitas Jadi Pelipat Surat Suara Pemilu
10.	Senin, 1 April 2019	Pemilu, Para Tunanetra Akan Memilih secara Mandiri dan Disertai Pendamping
11.	Rabu, 3 April 2019	Penyandang Tunanetra Harap Ada "Audiobook" untuk Kenali Kandidat dalam Pemilu
12.	Kamis, 4 April 2019	"Bagaimana jika Kebutuhan Disabilitas dalam TPS Tak Mendukung?"
13.	Kamis, 4 April 2019	Penyandang Disabilitas Enggan Memilih Caleg yang Tidak Dikenalnya
14.	Selasa, 9 April 2019	Kelompok Disabilitas: Insya Allah, Kami Tidak Akan Golput...
15.	Selasa, 16 April 2019	Petugas Diharapkan Datangi Penyandang Disabilitas yang Tak Bisa ke TPS

Mencermati berita-berita yang dimuat di *kompas.com* di atas, setidaknya ada tiga bagian besar yang dibahas. Pertama, terkait kisah, kebutuhan dan harapan difabel. Kedua, berhubungan dengan kepentingan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan ketiga, berita yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu.

Merujuk kepada tabel 1, pemberitaan yang berhubungan dengan kebutuhan dan harapan difabel terdapat pada berita nomor 1, 9, 11, 13, 14 dan 15. Pemberitaan yang terkait dengan kepentingan pasangan calon presiden dan wakil

presiden ada pada berita nomor 2, 3, 4 dan 6. Adapun berita yang berhubungan dengan penyelenggara pemilu disebutkan dalam berita nomor 5, 7 dan 10.

1. Berita Kisah, Kebutuhan dan Harapan Difabel

Pada berita 1 dengan judul KPU Diminta Lebih Perhatikan Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu 2019 secara garis besar disebutkan mengenai harapan Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih memperhatikan penyandang disabilitas mental dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Permintaan Yeni itu didasakan kepada pengalaman pilkada 2017, banyak disabilitas mental yang tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU.

Berita 9 yang berjudul Cerita Suka Duka Penyandang Disabilitas Jadi Pelipat Surat Suara Pemilu mengkisahkan perjuangan difabel menjadi pelipat surat dan harapan difabel tentang aksesibilitas mereka. Di dalam berita itu disebutkan ada belasan penyandang disabilitas yang memang menjadi rekan kerja KPU Bantul untuk melakukan pelipatan kertas surat suara. Selain itu, dalam informasi itu ada harapan difabel agar bisa dilibatkan dalam simulasi pemungutan suara mengingat banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang tak ramah disabilitas. Keinginan lain adalah perlunya pembenahan kantor pelayanan publik yakni ketersediaan toilet ramah disabilitas. Seperti di Kantor KPU Bantul belum tersedia toilet untuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Berita 11 yaitu Penyandang Tunanetra Harap Ada “Audiobook” untuk Kenali Kandidat dalam Pemilu, 13 Penyandang Disabilitas Enggan Memilih Caleg yang Tidak Dikenalnya. Pada berita itu ada usulan difabel netra agar tunanetra memiliki akses informasi terkait calon anggota legislatif atau calon presiden-calon wakil presiden yang akan dipilih. Agatha Febriany (30) merupakan salah satu tunanetra yang peduli dengan dunia perpolitikan di Indonesia. Menurut Agatha, penyampaian kampanye menggunakan audiobook ini lebih disukai tunanetra daripada menyuarakan kampanye melalui brosur.

Berita 14 Kelompok Disabilitas: Insya Allah, Kami Tidak Akan Golput berjudul. Isi berita ini menyampaikan kendala klasik yang dialami kawan-kawan disabilitas di Medan. Yaitu, akses menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat hari pencoblosan dan template braille. Kendala yang ada tidak menghalangi

mereka untuk memilih karena disabilitas bisa berpindah TPS dan masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Berita 15 Petugas Diharapkan Datangi Penyandang Disabilitas yang Tak Bisa ke TPS berisi tentang harapan-harapan difabel. Ketua I Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Heppy Sebayang, berharap partisipasi pemilih penyandang disabilitas meningkat di Pemilu 2019.

Harapan lain yaitu agar saat proses pemungutan suara berlangsung, panitia lebih ramah, memberikan pelayanan yang baik kepada para penyandang disabilitas dan penyelenggara Pemilu mendatangi para penyandang disabilitas yang tidak bisa datang ke TPS.

2. Berita Terkait Kepentingan Pasangan Capres-Cawapres

Berita 2 Adu Pernyataan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga soal Disabilitas Tema mengenai disabilitas dibahas dalam debat pertama Pilpres 2019. Pada berita ini beberapa hal yang disampaikan yaitu tentang isu hak manusia terhadap kelompok disabilitas. Terutama pemenuhan hak-hak mereka dan pemerataan kesetaraan kepada disabilitas.

Berita 3 Jokowi Klaim Bangun Fasilitas untuk Difabel, Cek Faktanya...berisi tentang kebijakan Jokowi sebagai petahana mendukung untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas atau kalangan difabel. Berbagai fasilitas-fasilitas pemerintah untuk pangan, pekerjaan, fasilitas umum yang ramah disabilitas.

Berita 4 Nelayan dan Difabel Ini Disebut Sandiaga dalam Debat Pilpres 2019 secara garis besar menyebutkan sosok difabel yaitu Zulfan Dewantara. Zulfan menjadi seorang inspirator, karena berhasil menjadi mentor bisnis secara online. Sandi menyebutkan kesetaraan bukan hanya akses kepada infrastruktur, kesehatan, tapi untuk maju membuka lapangan pekerjaan. Para difabel bukan untuk dikasihani, melainkan berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, butuh kesetaraan dan peluang hidup yang lebih baik.

Berita 6 Timses Sebut Visi Jokowi-Ma'ruf Perhatikan Penyandang Disabilitas sebagai informasi dari Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, isu disabilitas menjadi sangat penting karena menyangkut dengan pelayanan

setara yang diberikan oleh negara terhadap warga negara. Oleh karenanya, isu disabilitas menjadi fokus Jokowi-Ma'ruf. Dijelaskan visi Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf memperhatikan perlindungan terhadap kelompok difabel untuk mendapatkan layanan yang setara dengan warga negara. Dalam hal misalnya pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan sosial yang kondusif bagi kelompok difabel tersebut.

Di dalam berita itu juga dijelaskan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan yang inklusif. Mereka harus mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyandang disabilitas juga harus punya akses terhadap ketenagakerjaan, bisa mendapatkan kewirausahaan, dan diberikan kesempatan yang sama sebagai warga negara.

3. Berita Seputar Informasi Penyelenggara Pemilu

Berita 5 Berita KPU Sediakan Alat Bantu Huruf Braille untuk Pemilih Tunanetra sebagai informasi dari Penyelenggara Pemilu. Yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan alat bantu untuk pemilih tunanetra di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilu 2019 mendatang. Alat bantu itu berupa pola yang memuat huruf braille identitas peserta pemilu dalam surat suara. Khusus disabilitas ada template huruf braille untuk surat suara. Mereka bisa menggunakan template itu untuk menentukan pilihannya.

Berita 7 KPU Jombang Ajak Penyandang Disabilitas Simulasi Cara Mencoblos berisi informasi tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang Jawa Timur, mengajak para penyandang disabilitas untuk melakukan simulasi cara mencoblos saat pemungutan suara Pemilu 2019. Simulasi mencoblos kartu suara tersebut dilakukan saat sosialisasi Pemilu 2019 untuk komunitas disabilitas di SLB Muhammadiyah Jombang.

Pada simulasi itu, para penyandang disabilitas diberikan pemahaman tentang model dan warna surat suara, serta jumlah surat suara yang akan di coblos dalam Pemilu. Surat suara yang disosialisasikan, terdiri dari surat suara untuk pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan DPD, pemilihan anggota DPR RI dan pemilihan anggota DPRD Propinsi serta DPRD Kabupaten.

Berita 10 berjudul Pemilu, Para Tunanetra Akan Memilih secara Mandiri dan Disertai Pendamping, berisi informasi KPU Surakarta tentang jumlah DPT

tunanetra yang terpilih di Kota Solo dan cara tunanetra itu dalam memilih. Dijelaskan, para tunanetra itu akan menggunakan dua cara, yaitu secara mandiri dan disertai pendamping. Pemilihan secara mandiri dilakukan saat memilih pasangan calon presiden-calon wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan, saat memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten, para tunanetra itu akan disertai pendamping.

Merujuk kepada sampel pemberitaan tentang difabel di *kompas.com*, sudah terlihat adanya upaya-upaya media itu menjalankan fungsi pers. Yaitu, memberikan informasi, mendidik dan kontrol sosial. Jika mengamati pemberitaan-pemberitaan itu, belum sepenuhnya seluruh wilayah terakses untuk pemberitaan difabel.

Ke depan, perlu ada upaya-upaya yang lebih intens dan sinergi dengan berbagai pihak agar media lebih ramah penyandang disabilitas dalam Pilpres 2024. Difabel membutuhkan dukungan para jurnalis untuk menyampaikan aspirasi mereka. Harapannya Pilpres 2024 lebih baik daripada Pilpres 2019. Insan Pers merupakan juru informasi yang dapat menyuarakan banyak hal terkait difabel. Terkait Pilpres, yaitu bagaimana media ikut mengawal tersusunnya data pemilih tetap (DPT) yang akurat, pengadaan logistik Pemilu yang ramah difabel, TPS yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sebagainya.

Penyandang Disabilitas bukan berarti harus dianak emaskan. Mereka butuh dukungan agar bisa ikut memberikan suara saat Pilpres. Kesetaraan dan keadilan bagi kaum difabel harus terus diperjuangkan. Idealisme wartawan harus dikedepankan untuk menjadi narahubung mereka baik dari bawah ke atas maupun dari tingkat atas ke bawah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa pemberitaan difabel pada Pilpres 2019 di *kompas.com* sudah berupaya mewakili aspirasi para difabel. Aspirasi difabel yang diberitakan mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu dalam pemberitaan di *kompas.com* sangatlah sedikit. Ke depan, perlu adanya peningkatan pemberitaan difabel terkait pemilihan umum sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu inklusif di Indonesia pada tahun 2024.

Harapannya berita-berita itu semakin tersebar luas dan mendapatkan

respons positif dari para pemangku kebijakan dan penyelenggara Pemilu. Tidak hanya melalui pemberitaan di media cetak, penyiaran maupun online, dorongan-dorongan dari pihak-pihak yang peduli kepada difabel juga harus terus digaungkan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret. Pemberitaan mengenai aspirasi difabel terkait Pemilu nampaknya harus didukung oleh pemerintah selaku penyelenggara maupun masyarakat sosial. Dengan dukungan yang kuat berupa pemberian fasilitas akan meningkatkan partisipasi difabel. Terlebih kondisi lingkungan yang ramah difabel akan meningkatkan rasa percaya diri difabel dalam melaksanakan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Harapannya, aspirasi para difabel dapat diakomodasi dan mereka bisa memilih pemimpin sebagai hak warga negara sehingga Pemilu Inklusif 2024 bisa terwujud.

Daftar Pustaka

- Afifuddin.M. (2019). *Membumikan Pengawasan Pemilu, Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Agus, Salim (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta :Tiarawacana
- Bawaslu. (2018). *Buku Saku Difabel Mengawasi Pemilu 2019*. Kabupaten Jombang.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princenton University Press. .
- Herbowo, H. D. (2020). *Implementasi Pemilu Akses di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, DIY, Indonesia.
- Ihalauw, John J. O. I. 2003. *Bangunan Teori*. Salatiga : Fakultas Ekonomi UKSW
- Littlejohn, S. W. (2021). *Twelfth edition Theories of Human Communcation* . United State of America: Waveland Press.
- Nimmo, D. (1989). *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Remadja Karya.

Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogya: LkiS, h.190

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Buku Online

https://www.google.co.id/books/edition/Standar_Dan_Implementasi_Desain_Universa/IiHyDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+difabel&pg=PA6&printsec=frontcover

https://www.google.co.id/books/edition/Islam_dan_Disabilitas/nqw_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+difabel,+mansour+faki-h&pg=PA49&printsec=frontcover

Jurnal

Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 3 (2), 139-162.

Hasfi, N., Gono, J. N., & Wiwid. (2020). Internet Access and the Potential in Facilitating Online Political Communication of the Disabled Vol. 5 No. 1. *Aspikom*.

Indrawan, J., Efriza, & Ilmar, A. (2020). on the Presence of New Media (New Media) in the Political Communication Process. *the Medium Journal (online)*. Vol.8 No.1.

Koran Online

KPU diminta lebih perhatikan penyandang disabilitas mental dalam pemilu 2019 (2018, August 24). Retrieved October 28, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/18222771/kpu-diminta-lebih-perhatikan-penyandang-disabilitas-mental-dalam-pemilu-2019?page=all#page2>

INFOGRAFIK: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019. (2019, March 19). Retrieved October 28, 2021 <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/03/19/15285281/infografik-pemilih-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-2019>

Timeses Sebut Visi Jokowi-Ma'ruf Perhatikan Penyandang Disabilitas. (2019, February 02). Retrieved October 28, 2021 <https://nasional.kompas.com/>

[read/2019/02/28/19361331/timses-sebut-visi-jokowi-maruf-perhatikan-penyandang-disabilitas](https://regional.kompas.com/read/2019/02/28/19361331/timses-sebut-visi-jokowi-maruf-perhatikan-penyandang-disabilitas)

KPU Jombang Ajak Penyandang Disabilitas Simulasi Cara Mencoblos (2019, March 01). Retrieved October 28, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2019/03/01/07140361/kpu-jombang-ajak-penyandang-disabilitas-simulasi-cara-mencoblos>

Nelayan dan Difabel Ini Disebut Sandiaga dalam Debat Pilpres 2019. (2019, January 18). Retrieved October 28, 2021, , <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/01/18/14450931/nelayan-dan-difabel-ini-disebut-sandiaga-dalam-debat-pilpres-2019>

Jokowi Klaim Bangun Fasilitas untuk Difabel, Cek Faktanya...(2019, January 18). Retrieved October 28, 2021, <https://amp.kompas.com/properti/read/2019/01/18/100000521/jokowi-klaim-bangun-fasilitas-untuk-difabel-cek-faktanya>

Cerita Suka Duka Penyandang Disabilitas Jadi Pelipat Surat Suara Pemilu (2019, March 27). Retrieved October 28, 2021. <https://amp.kompas.com/regional/read/2019/03/27/19364731/cerita-suka-duka-penyandang-disabilitas-jadi-pelipat-surat-suara-pemilu>

Penyandang Disabilitas Enggan Memilih Caleg yang Tidak Dikenalnya (2019, April 04). Retrieved October 28, 2021. <https://amp.kompas.com/regional/read/2019/04/04/19265121/penyandang-disabilitas-enggan-memilih-caleg-yang-tidak-dikenalnya> diakses 28 Oktober 2021

“Bagaimana jika Kebutuhan Disabilitas dalam TPS Tak Mendukung?” (2019, April 04). Retrieved October 28, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/17254741/bagaimana-jika-kebutuhan-disabilitas-dalam-tps-tak-mendukung>

Petugas Diharapkan Datangi Penyandang Disabilitas yang Tak Bisa ke TPS (2019, April 16). Retrieved October 28, 2021). <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/04/16/21595361/petugas-diharapkan-datangi-penyandang-disabilitas-yang-tak-bisa-ke-tps>

Penyandang Tunanetra Harap Ada “Audiobook” untuk Kenali Kandidat dalam Pemilu. (2019, April 03). Retrieved October, 28, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/03/18150471/penyandang-tunanetra-harap-ada-audiobook-untuk-kenali-kandidat-dalam-pemilu>

Pemilu, Para Tunanetra Akan Memilih secara Mandiri dan Disertai Pendamping (2019, April 01). <https://regional.kompas.com/read/2019/04/01/14421591/pemilu-para-tunanetra-akan-memilih-secara-mandiri-dan-disertai-pendamping>. - di akses 28 Oktober 2021

Kelompok Disabilitas: Insya Allah, Kami Tidak Akan Golput. (2019 April 04). Retrieved October 28, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/09/21403211/kelompok-disabilitas-insya-allah-kami-tidak-akan-golput>.diakses 28 Oktober 2021

Adu Pernyataan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga soal Disabilitas (2019, January 17). Retrieved October 28, 2021. . <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/22043301/adu-pernyataan-jokowi-maruf-dan-prabowo-sandiaga-soal-disabilitas?page=all#page2>

Catatan Pemilu 2019 bagi difabel (2019, May 20). Retrieved October 28, 2021. <https://www.solider.id/baca/5228-catatan-pemilu-2019-difabel>